

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran implementasi Peraturan BPKP 5 Tahun 2021 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintahan (SPIP) Terintegrasi pada Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Jawa Timur. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sejak diterapkan pembaruan mekanisme SPIP pada tahun 2021, terjadi perbedaan peran Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur yang semula melakukan penjaminan kualitas dan evaluasi kemudian berganti hanya melakukan evaluasi atas penilaian mandiri maturitas SPIP yang dilakukan pemerintah daerah yang terlebih dahulu dilakukan penjaminan kualitas oleh Inspektorat Daerah. Namun, kurangnya pandangan mengenai SPIP yang masih dianggap sebagai kegiatan terpisah dari pelaksanaan tugas rutin pemerintahan daerah serta adanya pandemi *COVID-19* menjadi tantangan tersendiri bagi Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur yang berperan untuk melakukan pembinaan kepada pemerintah daerah dalam melaksanakan Penilaian Mandiri SPIP yang dilakukan sendiri oleh pemerintah daerah. Meskipun demikian, Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur tetap melakukan beberapa upaya agar pemerintah daerah dapat mengimplementasikan penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP sesuai dengan aturan yang berlaku.

Kata Kunci : Sistem Pengendalian Intern Pemerintahan (SPIP), Tingkat Maturitas SPIP, Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur.

ABSTRACT

This study aims to describe the implementation of BPKP Regulation 5 of 2021 regarding the Integrated Government Internal Control System (SPIP) at the Representative of the Financial and Development Supervisory Agency (BPKP) of East Java Province. The results of this study indicate that since the renewal of the SPIP mechanism was implemented in 2021, there have been differences in the roles of the BPKP Representatives of East Java Province, which initially carried out quality assurance and evaluation and then changed to only evaluating the SPIP maturity self-assessment conducted by the local government, which was first carried out by quality assurance by the local government. Regional Inspectorate. However, the lack of views on SPIP which is still considered a separate activity from the implementation of routine regional government duties as well as the COVID-19 pandemic is a challenge for the BPKP Representative of East Java Province whose role is to provide guidance to local governments in carrying out the SPIP Self-Assessment which is carried out by the regional government itself. . Nevertheless, the East Java Province BPKP Representative continues to make several efforts so that the local government can implement the maturity assessment of the SPIP implementation in accordance with applicable regulations.

Keywords : Government Internal Control System (SPIP), SPIP Maturity Level, BPKP Representative of East Java Province.